

news analysis

Dr Hariyadi MSI
Pakar Politik Universitas
Airlangga

Negosiasi Politik

PERNYATAAN Ketua BPK (Hadi Poernomo) sekilas memang ada penyimpangan prosedur yang ada, bahwa proyek Hambalang dikerjakan tanpa izin dan sepengetahuan Menpora.

Dari pernyataan ini, artinya penyimpangan dilakukan anak buah menteri. Itu sinyal dari BPK, bahwa menteri tidak tahu.

Memang itu yang bisa kita tangkap dari laporan BPK. Akan tetapi dari kacamata prinsip

■ Bersambung ke Hal 7

Negosiasi Politik

Sambungan Hal. 1

organisasi, seharusnya yang paling bertanggungjawab adalah pucuk pimpinan tertinggi. Jika anak buah melakukan tindakan menyimpang, maka pimpinan di atasnya harus bertanggungjawab. Bagaimana mungkin menteri tidak tahu ada kasus besar? Dari sudut pandang BPK yang kena adalah anak buah, tapi dari manajemen organisasi menteri harus bertanggungjawab.

Keputusan soal mana dari sudut pandang ini yang dianut masuknya ke ranah

politik. Kalau yang dianut adalah manajemen organisasi, dan mengandaikan yang bertanggungjawab pucuk pimpinan, maka dalam kasus korupsi Simulator SIM yang bertanggungjawab adalah Kapolri.

Kalau logika ini diikuti, maka semua kasus korupsi merunut level paling atas. Dari penyampaian Ketua BPK, maka Andi tidak terlibat, paling tinggi hanya kena pasal pembiaran, kelalaian.

Pernyataan lisan Ketua

BPK bahwa tetap ada kesalahan dari Menpora menjadi tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali dinyatakan dalam laporan tertulis.

Pertanyaannya, apakah betul menteri tidak tahu itu ada di ranah politis. BPK, menurut saya pantas diduga ada dalam koridor permainan politik itu. Sedangkan soal penyelesaian akhir kasus ini, apakah berakhir secara hukum atau tidak, sangat bergantung negosiasi politik.

Seandainya, ke ranah hukum, bebas atau tinggi rendah

tingkat hukuman bergantung proses negosiasi politik. Dengan kata lain, kebenaran hukum sangat bergantung kebenaran politik.

Ini pasti akan membuat sorotan publik pada sisi-sisi pemerintahan yang dianggap korup, sedangkan capaian-capaian perekonomian kurang disoroti. Akan tetapi kalau publik memandang pemerintahan ini melulu bobrok, pasti sudah jatuh. Buktinya, tidak. Karena ada sejumlah pencapaian juga. (tribunjakarta/yud)